



	Penanganan RTLH di Jogja Wajib Terus Diupayakan					
TAJUK	<p>Pemenuhan kebutuhan rumah layak di DIY masih menjadi persoalan. Ribuan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) di DIY saat ini menanti penanganan. Program perbaikan RTLH masih menjadi pekerjaan besar Pemda DIY. Meski 1.000 lebih rumah masuk sasaran rehabilitasi pada 2026, kebutuhan penanganan hunian tidak layak masih tergolong tinggi, terutama di Kabupaten Sleman dan Bantul.</p> <p>Data dari lima kabupaten/kota menunjukkan program RTLH tetap menjadi</p>	<p>prioritas meski sebagian daerah menghadapi keterbatasan fiskal dan kebijakan efisiensi anggaran. Padahal penyediaan rumah layak adalah pemenuhan kebutuhan dan hak dasar masyarakat yang dijamin undang-undang.</p> <p>Namun, faktanya sampai sekarang masih banyak masyarakat yang hidup di rumah yang tak layak huni. Kondisi rumah seperti sanitasi buruk, atap bocor, tembok rapuh masih dirasakan sebagian warga. Padahal, kondisi rumah tidak layak huni berdampak pada kesehatan</p>	<p>dan kualitas tumbuh kembang anak yang tinggal di dalamnya. Lebih jauh keberadaan rumah layak huni juga menyangkut martabat dan kualitas hidup manusia.</p> <p>Masih banyaknya RTLH yang belum ditangani semestinya menjadi program prioritas pemerintah untuk diselesaikan, baik Pusat maupun daerah meski dilanda keterbatasan anggaran akibat buntut kebijakan efisiensi dan pengurangan sumber daya keuangan besar-besaran untuk sektor lain seperti program Makan Bergizi</p>	<p>Gratis (MBC) dan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP).</p> <p>Untuk itu pemerintah harus lebih kreatif mengupayakan pembiayaan ini jika memang mengalami keterbatasan anggaran. Salah satu opsi yang bisa dicoba adalah menggandeng sektor swasta atau korporasi melalui program <i>corporate social responsibility</i> (CSR).</p> <p>Potensi CSR yang ada di masing-masing daerah perlu dipetakan dan dijangkau. Meski CSR mungkin tidak bisa menyelesaikan seluruh RTLH, tetapi beragama</p>	<p>sumber pendanaan akan meringankan beban keuangan daerah.</p> <p>Solusi lainnya adalah memaksimalkan peran masyarakat lewat gotong royong dalam pembangunan RTLH. Praktik kearifan lokal ini potensial meringankan beban finansial karena tidak menuntut banyak biaya dalam pembangunan RTLH.</p> <p>Hal yang tidak kalah penting adalah memastikan bahwa program perbaikan rumah dijalankan dengan tepat sasaran. Data akurat menjadi kunci agar bantuan benar-benar</p>	<p>diterima oleh keluarga yang membutuhkan. Selain itu transparansi dalam proses penyaluran juga harus dijaga untuk menghindari penyimpangan dan meningkatkan kepercayaan publik.</p> <p>Ketika masyarakat tinggal di rumah yang sehat dan aman, biaya kesehatan dapat ditekan, kualitas pendidikan anak meningkat, dan produktivitas ekonomi keluarga menjadi lebih baik. Dengan kata lain, memperbaiki rumah berarti memperbaiki masa depan generasi Indonesia.</p>

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1.	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 01 Juli 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005